

**Analisis Kinerja Finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau  
Periode 2019-2022**

Andrianus<sup>1)</sup>, Amanah Hijriah<sup>2)</sup>, Juanda Astarani<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Akuntansi Universitas Tanjungpura

<sup>1</sup>[b1032211031@student.untan.ac.id](mailto:b1032211031@student.untan.ac.id), <sup>2</sup>[amanah.hijriah@ekonomi.untan.ac.id](mailto:amanah.hijriah@ekonomi.untan.ac.id),

<sup>3</sup>[juanda.astarani@ekonomi.untan.ac.id](mailto:juanda.astarani@ekonomi.untan.ac.id)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to measure and assess the financial performance of the Sekadau Regency Regional Government for the 2019-2022 period based on regional revenue realization data. Analysis of the financial performance of the Sekadau Regency Regional Government is measured by financial ratios. The financial performance of the Sekadau district local government can be measured by financial ratios, namely the degree of decentralization, the regional financial dependency ratio, and the regional independence ratio. Qualitative research is the type of this research. Sekadau Regency Regional Revenue Realization data for the 2019-2022 period is the secondary data used in this study. The data was obtained using documentation techniques. The results showed that the financial performance of the Sekadau Regency Regional Government for the 2019-2022 period was measured based on the value of the degree of decentralization in the very bad category, the ratio of regional financial dependency in the very high category, and the ratio of regional independence illustrating an instructive relationship pattern.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur serta menilai kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau periode 2019-2022 berdasarkan data realisasi pendapatan daerah. Analisis kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau diukur dengan rasio finansial. Kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten Sekadau dapat diukur dengan rasio finansial yaitu derajat desentralisasi, rasio dependensi finansial daerah dan rasio kemandirian daerah. Penelitian kualitatif merupakan jenis dari penelitian ini. Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau periode 2019-2022 merupakan data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau periode 2019-2022 diukur berdasarkan nilai derajat desentralisasi masuk dalam kategori sangat tidak baik, rasio dependensi finansial daerah masuk dalam kategori sangat tinggi dan rasio kemandirian daerah menggambarkan pola hubungan yang instruktif.

**Kata kunci:** kinerja finansial, rasio finansial, pemerintah daerah

**1. PENDAHULUAN**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah memberikan wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 13 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam melaksanakan jalannya pemerintahan pemerintah daerah tidak bisa melakukan kebijakan sesuka hati tetapi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang serta dapat di pertanggungjawabkan. Finansial daerah yang baik di kelola secara ekonomis, efisiensi, bertanggung jawab, efektif dan transparan serta dikelola berdasarkan regulasi (Harahap, 2020). Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai kewenangan serta kewajiban dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan dan mengurus masyarakat di daerahnya secara mandiri merupakan pengertian dari desentralisasi (Hafizi and Amalia 2022).

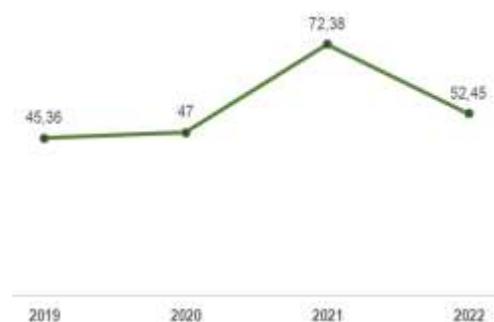
Pemerintah daerah sebagai ujung tombak dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahannya harus memberikan pelayanan

kepada warganya sebaik mungkin serta mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan finansial pemerintah daerahnya untuk menunjukkan transparansi kepada publik. Masyarakat bisa melihat kinerja finansial untuk mengetahui baik atau buruknya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya (Harahap, 2020). Dalam mengatur finansial pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja finansial yang baik dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, selain meningkatkan kemandirian daerah (Putra 2022).

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator keuangan (J. P. R. Harahap and Nasution 2019). Indikator finansial dapat memberikan gambaran tentang keadaan baik atau buruk kinerja finansial pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah.

Salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD suatu daerah yang semakin besar menggambarkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola potensi di daerahnya. Selain itu, semakin besar PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Hafandi dan Romandhon, 2020). Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau mengalami fluktuasi setiap tahunnya (Dinas Kominfo,2023).

Gambar 1. Data Realisasi PAD (Milyar Rupiah) Kabupaten Sekadau periode 2019-2022



Sumber: BPKAD Kabupaten Sekadau

Hasil penelitian Apridiyanti (2019) menunjukkan kinerja finansial pemerintah daerah dipengaruhi oleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan. Hasil penelitian Sari dan Halmawati (2021) juga menunjukkan kinerja

finansial pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan positif oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan Harahap (2020) menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik dalam hal kinerja finansialnya, meskipun nilai rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori rendah, tingkat dependensi kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tergolong sangat besar dan target penerimaan PAD yang direncanakan belum tercapai dengan maksimal. Penelitian yang dilakukan Azhar (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial Pemerintah Daerah Kota Langsa. Penelitian yang dilakukan Harahap dan Nasution (2019) menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya pada periode 2012-2016 pemerintah kota Medan telah memberikan kinerja yang sangat bagus.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagai salah satu organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk menunjukkan kinerja finansial yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dapat mengukur kinerja finansial berdasarkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap periode untuk melihat apakah terdapat penurunan atau peningkatan (Mahsun 2014). Penelitian ini menganalisis kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan Derajat Desentralisasi, Rasio dependensi finansial Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi bahwa setiap tahun nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau terlihat berfluktuasi. Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan tingkat kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten Sekadau dengan mengukur rasio keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik yang sama. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian yang inkonsisten satu dengan yang lainnya. Keterbaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dan menganalisis Data Realisasi Pendapatan Daerah periode 2019-2022 yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten Sekadau dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal yang tepat dan berimplikasi bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat di kabupaten Sekadau. Bagi masyarakat kabupaten Sekadau penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan motivasi untuk saling bergotong royong membangun kabupaten Sekadau ke arah yang lebih baik lagi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya teori keagenan menitikberatkan pada hubungan antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan tugas serta menetapkan kebijakan tertentu (principal) terhadap pihak lain (agen) (Mitchell and Meacheam dalam Bendickson et al., 2016). Menurut Suartana (2010), teori agen beranggapan bahwa agen sebagai pihak yang lebih rendah wajib menjalani perintah dari atasan (principal) untuk melakukan kinerja yang efisien. Teori agen menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi terdapat pengaruh yang besar dari atasan (principal) ke bawahan (agen). Teori agensi memiliki relevansi dengan penelitian ini bahwa prinsipal merupakan publik yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pemerintah yang bertindak sebagai agen (Indriani and Hermi 2020). UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar”. Hal ini menegaskan publik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Mahsun (2014) organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang telah disepakati dan berkolaborasi demi mencapai visi dan misi secara bersama-sama dan terorganisir. Sedangkan sektor publik adalah semua bentuk pelayanan kepada khalayak ramai yang diberikan oleh suatu organisasi yang diatur oleh undang-undang. Jadi, organisasi sektor publik adalah kumpulan beberapa orang untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai dengan undang-undang. Salah satu contoh organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang biasa disebut dengan desentralisasi. UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Pemerintah daerah melalui otonomi daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban berupa laporan finansial kepada pemangku kepentingan atas pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Halim dalam Handayani, 2018). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kinerja finansial pemerintah daerah

sebagai bentuk pengawasan dan transparansi dari pemerintah daerah.

Salah satu cara untuk menilai kinerja finansial pemerintah daerah adalah dengan mengukur rasio kinerja finansial. Kinerja finansial pemerintah daerah adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah direncanakan (Bastian dalam Zahkiah, 2022). Untuk dapat mengukur kinerja finansial pemerintah daerah bisa menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

### 1. Derajat Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan negara melalui pelimpahan wewenang dengan melayani masyarakat sebaik mungkin serta membuat kebijakan yang dapat diterima oleh semua orang (Dali dkk, 2021). Derajat desentralisasi dihitung dengan membagikan jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Tingkat desentralisasi dipengaruhi oleh kontribusi PAD suatu daerah semakin tinggi PAD suatu daerah semakin tinggi pula kemampuan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi (Hafizi dan Amalia, 2022)

### 2. Rasio Dependensi Finansial Daerah.

Rasio dependensi finansial daerah adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi keterikatan finansial kepada pemerintah tingkat satu dan pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio dependensi finansial daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin besar keterikatan finansial kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurut Hafizi dan Amalia (2022) rasio ini diukur dengan membagikan total pendapatan transfer dengan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

### 3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sendiri pemerintahnya mulai dari pembiayaan, pembangunan serta pelayanan kepada penduduknya. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian daerah maka semakin baik tingkat kemandirian daerah. Rasio ini diukur dengan membagikan total PAD dengan total transfer pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau dipilih sebagai tempat penelitian yang beralamat di Jl. Merdeka Timur KM.9, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, kota Sekadau,

Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sekadau tahun 2019-2022. Sumber data diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. Teknik dokumentasi dipilih untuk memperoleh data pada penelitian ini. Beberapa langkah untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif seperti berikut ini:

1. Kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau diidentifikasi dan dianalisis dengan cara menghitung rasio keuangannya berdasarkan data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sekadau periode 2019-2022.
2. Memberikan penilaian terhadap kinerja finansial daerah kabupaten Sekadau periode 2019-2022 berdasarkan nilai rasio dan kriteria penilaian yang telah ditentukan,
3. Melakukan penafsiran terhadap hasil analisis berdasarkan indikator berikut ini:

- a. Derajat desentralisasi di hitung dengan:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1: kriteria penilaian derajat desentralisasi

Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022)

- b. Rasio dependensi finansial daerah di hitung dengan:

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun	Derajat Desentralisasi	Kesanggupan Keuangan Daerah
2019	5,17%	Sangat tidak baik
2020	5,29%	Sangat tidak baik
2021	8,25%	Sangat tidak baik
2022	7,46%	Sangat tidak baik
Rata-rata	6,54%	Sangat tidak baik

Tabel 2: kriteria penilaian rasio

No.	persentase	Pola hubungan
A	0%-25%	Instruktif
B	25%-50%	Konsultif
C	50%-75%	Partisipatif
D	75%-100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia, (2022)

- c. Rasio kemandirian daerah di hitung dengan:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3: kriteria penilaian rasio

No.	persentase	Dependensi Finansial Daerah
A	0,00%-10,00%	Sangat kecil
B	10,01%-20,00%	kecil
C	20,01%-30,00%	Sedang
D	30,01%-40,00%	Cukup
E	40,01%-50,00%	Besar
F	>50,00%	Sangat besar

Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Derajat Desentralisasi

Tabel 4. Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2022

No.	Derajat Desentralisasi	Kesanggupan Finansial Daerah
A	0,00%-10,00%	Sangat tidak baik
B	10,01%-20,00%	Tidak baik
C	20,01%-30,00%	Sedang
D	30,01%-40,00%	Cukup
E	40,01%-50,00%	Baik
F	>50,00%	Baik sekali

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau

mengalami fluktuasi. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 8,25 sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 5,17. Nilai rata-rata derajat desentralisasi adalah 6,54. Berdasarkan indikator tersebut derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau termasuk dalam kategori sangat tidak baik. Jika dibandingkan dengan kota Jember memiliki rata-rata derajat desentralisasi sebesar 17,81% (Hafizi dan Amalia, 2022) dan rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 6,55% (Harahap, 2020). Berdasarkan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau lebih kecil dari rata-rata derajat desentralisasi pemda kota Jember dan sama dengan Derajat desentralisasi Pemda kabupaten Tapanuli Selatan meskipun ketiga pemda tersebut termasuk pemda dengan kategori sangat tidak baik berdasarkan nilai derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi yang rendah disebabkan karena nilai PAD yang masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemda belum mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penyumbang PAD yang besar, sedangkan komponen retribusi daerah memberikan kontribusi yang paling sedikit.

Nilai derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau yang tergolong masih kecil terjadi karena Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai pendapatan daerah. Nilai realisasi PAD dan pendapatan daerah yang naik turun menyebabkan nilai derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau berfluktuatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sekadau belum mampu sepenuhnya melaksanakan desentralisasi dengan baik.

Untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten Sekadau dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajibannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah seperti dengan melakukan sosialisasi, melakukan pendataan ulang secara berkala, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja terhadap semua stakeholder. Pajak daerah sebagai kekuatan finansial daerah seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa melakukan kerja sama dengan para investor untuk mengelola potensi daerah dan membangun perusahaan daerah yang ada di wilayah kabupaten Sekadau. Semakin banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka akan meningkatkan pendapatan daerah dari bagi hasil dan pajak perusahaan serta dapat mengurangi pengangguran.

**Rasio Dependensi Finansial Daerah**

Tabel 5. Rasio Dependensi Finansial Daerah

Periode	Rasio	Dependensi keuangan daerah
2019	89,26%	Sangat besar
2020	90,57%	Sangat besar
2021	88,12%	Sangat besar
2022	92,52%	Sangat besar
Rata-rata	91,11%	Sangat besar

Sumber: data diolah, 2024

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio dependensi finansial daerah kabupaten sekadau masih tergolong sangat besar dengan nilai rata-rata 90,11% jika dibandingkan dengan pemerintah Kota Bandar Lampung yang memiliki nilai rata-rata sebesar 69,61% (Rahardi dan Digdowiseiso, 2023) dan nilai rata-rata rasio dependensi finansial daerah Kabupaten Jember sebesar 79,53% (Harfizi dan Amalia, 2022) rasio dependensi finansial daerah kabupaten sekadau lebih besar daripada kedua pemda tersebut. Dengan hasil ini, menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sekadau belum bisa melepaskan dependensi finansial terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dibandingkan pemda kota Bandar Lampung dan pemda Kabupaten Jember.

Hasil perhitungan rasio dependensi finansial daerah, pos dana penimbang terutama dana alokasi umum (DAU) yang besar menyebabkan rasio dependensi finansial daerah sangat tinggi. Besarnya nilai DAU menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Sekadau masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahannya. Tingginya nilai rasio dependensi finansial daerah ini juga menunjukkan bahwa pemda tidak mampu membiayai pemerintahannya dari PAD.

Dependensi finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat tentunya sangat berdampak terhadap pembangunan di wilayah pemda Kabupaten Sekadau. Terhambatnya pembangunan di Kabupaten

Sekadau akan membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melambat karena sarana dan prasarana public yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah bisa mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan menggali potensi daerah dan memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah.

**Rasio Kemandirian Daerah**

Tabel 6. Rasio Kemandirian Daerah

Periode	Rasio	Pola hubungan
2019	5,79%	Instruktif
2020	5,84%	Instruktif
2021	9,66%	Instruktif
2022	8,07%	Instruktif
Rata-rata	7,34%	Instruktif

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian pemerintah kabupaten sekadau termasuk ke dalam pola hubungan instruktif. Rasio terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 5,79% sedangkan rasio tertingginya terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 9,66%. Nilai rata-rata rasio kemandirian daerah kabupaten sekadau sebesar 7,4%. Jika dibandingkan dengan rasio kemandirian daerah kabupaten Pekalongan tergolong rendah dengan pola instruktif dengan nilai rata-rata sebesar 21,51% (Azzarohma dan Witono, 2023) dan pemerintah Kabupaten Muna adalah 5,7% dengan pola instruktif (Dali dkk, 2021) maka ketiga daerah tersebut sama-sama mempunyai pola hubungan yang instruktif.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sekadau belum mampu melaksanakan pemerintahannya secara mandiri. Meskipun nilai rata-rata rasio kemandirian pemda kabupaten sekadau lebih besar dari rata-rata rasio kemandirian pemda kabupaten Muna. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam urusan otonomi daerah ini disebabkan oleh pemerintah daerah masih mengandalkan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman, sementara nilai PAD masih rendah. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan nilai PAD.

**5. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis derajat desentralisasi, rasio dependensi finansial daerah dan rasio kemandirian daerah maka kinerja finansial pemerintah kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut: Rata- rata derajat desentralisasi masuk ke dalam kategori sangat tidak baik, rata-rata rasio dependensi finansial daerah masuk ke dalam

kategori sangat besar dan rata-rata rasio kemandirian daerah masuk ke dalam kategori pola hubungan yang instruktif. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kinerja finansial pemerintah kabupaten Sekadau masih belum optimal terutama dalam hal mengelola potensi daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Darah (PAD).

**5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah kabupaten Sekadau dapat mengoptimalkan potensi di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki dengan bekerja sama dengan pihak-pihak investor untuk membangun perusahaan di wilayah Kabupaten Sekadau. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pemerintah kabupaten Sekadau juga perlu melakukan pembangunan yang merata agar pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari memiliki beberapa keterbatasan sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini sebagai berikut: pertama dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data sekunder hal ini menyebabkan peneliti tidak bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan penyebab data realisasi pendapatan daerah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian menggunakan data primer seperti wawancara langsung terhadap informan yang berkompeten untuk memperoleh data lebih akurat. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian berikutnya dapat menambahkan rasio-rasio keuangan yang lainnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hasil penelitian lebih representatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Apridiyanti, Ajeng. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4 (3): 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>.

Azhar, Iqlima. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa." *Jurnal Transformasi Administrasi* 11 (02): 164–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>.

Bendickson, Josh, Jeff Muldoon, Eric Liguori, and

- Phillip E. Davis. 2016. "Agency Theory: The Times, They Are a-Changin'." *Management Decision* 54 (1): 174–93.  
<https://doi.org/10.1108/MD-02-2015-0058>.
- Dali, Nasrullah, Mulyati Akib, and Wa Haisa. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6 (1): 319–36.  
<https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19500>.
- Hafizi, Rahmani, and Firda Ayu Amalia. 2022. "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 5 (2): 116–30.  
<https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (1): 34.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Harahap, Junita Putri Rajana, and Murni Dahlena Nasution. 2019. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8 (1): 9–14.  
<https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>.
- Indriani, Andini, and Hermi Hermi. 2020. "Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan Daerah." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20 (1): 99–116.  
<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6947>.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nurul Sukma Handayani. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota DiKalimantan Timur," 1–12.  
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>.
- Putra, Syahri Azda. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 3 (1): 1–13. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.388>.
- Rahadi, Agung Danang, and Kumba Digdowiseiso. 2024. "3151-Article Text-16195-1-10-20230903" 4 (5): 5946–56.
- Su, Angela. 2023. "Berty." *Mapping the Posthuman* 3 (1): 56–60.  
<https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>.
- Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. 2023. *Buku Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023*. Sekadau: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.
- Zakiah, Kiki. 2022. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020." *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 7 (2): 364–78.  
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>.